

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasifik akhir-akhir ini sedang menyeruak, tampil merebut peranan penting bagi Indonesia. lima tahun terakhir ini wilayah Pasifik sungguh menyita perhatian negara-negara besar, khususnya dibidang politik, ekonomi, pembangunan dan keamanan. Bagi Indonesia kawasan Pasifik cukup strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara Pasifik adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik. sebagai kawasan tetangga yang perlu didekati dalam konteks mendorong terciptanya lingkungan yang stabil, makmur, dan bersahabat upaya pembangunan kerjasamapun di lakakukan .

Kawasan Pasifik yang di maksud disini adalah Pasifik Selatan. Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terletak di sebelah timur wilayah Indonesia yang tepatnya berbatasan antara Papua dengan Papua Nugini. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan pada umumnya terdiri dari negara-negara yang lemah, namun sebagian besar eksistensinya berada dalam suatu kawasan yang relatif "terang dan stabil". Dari segi kualitas dan kuantitasnya keamanan, kesejahteraan dan sumber daya manusia dikawasan ini pada umumnya "rendah" dan masih tergantung pada bantuan luar untuk jangka waktu panjang; seperti negara Australia dan Selandia Baru serta negara-negara Barat lainnya, seperti : Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, Cina dan Jepang atau setelah era perang dingin. Sampai saat ini proses dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan belum

lanjutan dari Pasifik Utara, selain itu merupakan jalur perhubungan laut yang penting dan sangat ramai. Sejak terjadinya proses dekolonisasi, muncul negara-negara kecil baru di kawasan Pasifik yang menjadikan kawasan ini semakin penting artinya. Selain itu keadaan geografis negara Pasifik Selatan yang terdiri atas beribu-ribu pulau kecil, jurang-jurang di kedalaman lautan serta jumlah penduduknya yang sangat sedikit, menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang ideal untuk percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbahnya. (Adil, 1993). selesai secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mendorong kehadiran negara-negara besar tersebut di kawasan Pasifik Selatan, antara lain; negara-negara yang terdapat dibagian sebelah Utara Samudera Pasifik menganggap bahwa kawasan tersebut merupakan

Perekonomian negara-negara di Pasifik Selatan pada umumnya masih terbatas. Penghasilan utama yang diandalkan adalah dari sektor-sektor perikanan, perkebunan kelapa, pariwisata, dan kerajinan tangan. Sektor pariwisata di kawasan ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Di sektor pertanian negara-negara di Pasifik Selatan, secara umum memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan jenis komoditi premium seperti kopra, kopi, kakao, kelapa sawit dan tebu. namun demikian, negara-negara dalam kawasan ini belum dapat memaksimalkan nilai ekonomis dari potensi sumber daya alam yang dimiliki. Kendala yang dimiliki seperti masih terdapat pada minimnya jumlah penduduk, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya investasi serta bantuan dari negara lain menjadi banyaknya kendala berkembangnya pembangunan negara. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di Pasifik

Selatan yang menjadi potensi dalam aktivitas perekonomian. Namun, pemanfaatan sumber daya alam terlihat tidak maksimal. Di satu sisi, sistem ekonomi negara-negara ini telah membuka pasar mereka secara bebas dan juga mereka terbuka untuk menerima bantuan asing serta investasi negara lain (Herry).

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan telah lama terjalin dan terus mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Indonesia pertama kali membuka hubungan diplomat di kawasan ini dengan Fiji, yaitu pada tahun 1974, kemudian Papua Nugini 1975, Samoa 1978, Kepulauan Solomon 1983, Mikronesia 1991, Kepulauan Marshall 1993, Tonga 1994, Vanuatu 1995, Palau 2007, Tuvalu 2012, Nauru 2012, dan Kiribati 2013.

Politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan di era Joko Widodo berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan terus berlandaskan prinsip bebas aktif. Segala kebijakan luar negeri Indonesia pada dasarnya diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia, seperti era Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan politik luar negeri terhadap ASEAN. Perhatian yang lebih terhadap kawasan Asia Tenggara, menyebabkan minimnya perhatian kepada wilayah Pasifik Selatan yang secara geografis juga merupakan lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Berbeda dengan era Joko Widodo, dimana hal ini sangat terlihat ketika Indonesia mulai aktif untuk terlibat di dalam forum Pasifik Selatan.

Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk menggali potensi pasar prospektif sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. Dengan visi menjadi

negara ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2045, Pemerintah Republik Indonesia (RI) sangat aktif membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor industri dan komunitas bisnis. Dalam Rapat Terbatas Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan, Presiden Joko Widodo berpandangan, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi suatu kawasan yang maju dan berkembang . Kehadiran Indonesia khusus di Pasifik Selatan tidak hanya akan membawa dampak positif bagi branding Indonesia, namun juga ikut dalam membantu menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan tersebut.

Peningkatan kerja sama pembangunan antara Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan melalui upaya “*sharing of best practices*” juga terus dilakukan, khususnya dalam bidang-bidang yang diminati seperti pertanian, perikanan, pendidikan, demokrasi, *good governance*, dan penanggulangan bencana alam. Sejak berdirinya direktorat kerja Sama Teknik di Kementerian Luar negeri Republik Indonesia (RI) pada 2006, tercatat sebanyak 500 peserta dari negara-negara di Pasifik selatan telah menerima bantuan di antaranya adalah beasiswa pendidikan serta hibah peralatan pertanian dan kepolisian, serta berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Indonesia. Bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia (RI) kepada Pasifik Selatan juga berupa pembangunan infrastruktur.

Tujuan utama dan terpenting Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan kawasan ini adalah meredam dukungan-dukungan negara Pasifik Selatan terhadap

kemerdekaan Papua di forum internasional. Diplomasi Indonesia aktif dalam berbagai organisasi di kawasan ini antara lain; *Pacific Island Forum* (PIF), dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Keberadaan organisasi-organisasi ini sangat penting bagi Indonesia, jika isu Papua di angkat pada forum-forum internasional maka citra Indonesia menjadi buruk dimata dunia . Mengingat kasus kemerdekaan Papua merupakan hal yang sensitif terutama bagi dunia internasional karena menyangkut dengan masalah Hak Asasi Manusia. Hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan jika tidak dikelola dengan baik di khawatirkan Pasifik Selatan berpihak pada gerakan Papua Merdeka.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Papua terus menjadi duri dalam daging. sejak menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1969 , sebagian penduduk Papua merasa kurang puas dengan hasil Pepera yang hanya melibatkan 1.025 kepala suku di bawah ancaman bersenjata militer mengacu kepada integrasi Papua yang tergabung ke dalam Republik Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi persoalan bagi masyarakat Papua.

Dukungan internasional kepada kelompok pro-merdeka di Papua menimbulkan kompleksitas yang cukup serius bagi pemerintahan Indonesia dalam berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Meski pemerintah memiliki legitimasi politik yang kuat (kedaulatan yang sah) di Papua, posisi Indonesia menjadi lemah ketika berhadapan dengan komunitas internasional berkaitan dengan persoalan demokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan di Papua. hal ini di karenakan isu-isu tersebut merupakan agenda global yang kerap di pakai untuk mengukur ataupun menilai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan sebuah negara.

Lobi internasional oleh kelompok pendukung kemerdekaan Papua dilakukan secara bilateral antar negara maupun masuk dalam forum regional, Internasional dan juga LSM. Lobi bilateral dijalankan melalui pendekatan persuasif kepada pemegang simpul pemerintah diberbagai negara. Upaya bilateral ini juga dilakukan dengan membuka kantor perwakilan dan konsulat. Hasilnya adalah beberapa negara di Pasifik Selatan secara tegas mendukung Perjuangan kelompok pro-merdeka Papua seperti Vanuatu, Tuvalu, Nauru dan Cook (*Cook Island*).

*United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) merupakan wadah aspirasi masyarakat Papua yang terdiri dari tokoh-tokoh Papua yang dibentuk dengan tujuan Persatuan Perlawanan Pembebasan untuk Papua Barat. Tujuan Pembentukan ULMWP sebagai wadah persatuan bangsa papua atau wadah koordinatif untuk mengajukan aplikasi *west papua* di MSG dan mendorong proses penyelesaian masalah Papua ditingkat Internasional melalui Jalur yang legal untuk menacapai Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua. Menyampaikan masalah-masalah Papua ke panggung internasional Tokoh-tokoh Papua Merdeka menjadi lebih gigih memperjuangkan nasibnya diluar melalui berbagai forum internasional.

Kedekatan etnografis, geografis, antropologis, kesamaan ras dan budaya, masalah Papua harus diselesaikan secara damai dan karnanya sangat penting apabila negara-negara Pasifik Selatan ini ikut memberikan solusi. Kedekatan emosional dan persamaan ras sebagai kesamaan orang Melanesia dianggap oleh pemerintahan Indonesia bisa memberi solusi yang baik dan meringankan; Indonesia dalam hal ini tidak mau kehilangan Papua hanya oleh karena masalah-

masalah internal. Salah satu upaya Indonesia menangani kasus Papua Merdeka, adalah memberlakukan UU.No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada masyarakat Papua, namun hal ini belum juga dapat meredam masyarakat dan aksi-aksi Papua Merdeka.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dengan jumlah pulau Indonesia adalah sebanyak 17.508 dengan keseluruhan wilayahnya adalah 1,904,569 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau utama dan terbesar Indonesia adalah pulau Papua, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Sulawesi dan pulau Sumatera. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, Indonesia berpenduduk 150 juta, terbesar ke-5 di dunia.

Sementara, Pasifik Selatan adalah negara-negara kecil bekas jajahan dari berbagai negara antara lain Inggris, Prancis, Amerika, Australia dan Selandia Baru. Indonesia dalam hal ini tidak mau di anggap remeh sebagai negara yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hal ini permasalahan Papua sangat mengganggu Pembangunan Indonesia dimata dunia internasional dan dimata Pasifik. Dihadapan negara-negara Pasifik Indonesia mau tampil sebagai “Bigbrater” . artinya Indonesia perlu tampil sebegitu wibawa sehingga nampak sebagai sebuah negara besar yang bisa di andalkan. (Fairbairn, et al., 1991: 39).

Tidak dipungkiri isu lingkungan juga menjadi hal yang cukup serius di negara-negara kepulauan Pasifik Selatan. Daerah-daerah pesisir di Pasifik Selatan kian terancam karena adanya eksploitasi sumber daya laut, polusi, penambangan,

dan buruknya perencanaan pesisir sehingga berujung pada degradasi pesisir. Berkurangnya mangrove dan bukit karang juga mengakibatkan daerah-daerah yang bersangkutan rentan terserang badai dan angin topan. Diungkapkan juga bahwa tidak ada pihak pemerintah maupun komunitas lokal yang sanggup menangani sendiri situasi pesisir di banyak wilayah Pasifik Selatan. Mereka membutuhkan bantuan teknis yang tidak bisa ditangani hanya dalam skala lokal. Di samping itu kelangkaan tuna juga terjadi karena buruknya manajemen perikanan. Mereka membutuhkan setidaknya kolaborasi regional yang dekat mengingat tuna merupakan ikan yang kerap bermigrasi. Kurangnya regulasi mengenai penambangan bawah laut juga menjadikan aktivitas eksploitasi berlebihan kerap berlangsung. Beragam aplikasi lisensi eksplorasi telah diajukan dan saat ini tengah dipertimbangkan (Worldbank, 2004: 2,3) .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti dapat merumuskan rumusan bahwa, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

Apa kepentingan Indonesia di Pasifik terkait dengan Masalah Papua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

Hendak mengetahui mengenai kepentingan Indonesia di Pasifik terkait Masalah Papua.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca lainnya sebagai bacaan dan kajian mengenai Kepentingan Indonesia di Pasifik terkait Masalah Papua

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian yang dilakukan penulis akan dilaporkan kedalam susunan sistematika penulis skripsi sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

Dalam bab ini akan di uraikan konsep kepentingan Indonesia di Pacifik terkait masalah Papua, dan Bagaimana tindakan Pemerintah dalam menyelesaikannya masalah di papua dan alasan pemelihan konsep, teori dan kerangka pemikiran.

##### **BAB III PEMBAHASAAN**

Akan menjelaskan bagian inti dalam penelitian, yang memamparkan penelitian yang dilakukan, argumen serta data-data yang digunakan untuk menjelaskan studi kasus dalam penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori atau konsep yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir, yaitu bagian penutup. Penelitian memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Apakah hasil peneliti mendukung hipotesis yang sudah peneliti buat sebelumnya.